

Implementasi Program Keluarga Harapan terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Desa Kayuuwi, Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa

Milani Agnesia Rumondor¹

Stefanus Sampe²

Gustaf Undap³

Email Korespondensi: agnesiamilani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Program Keluarga Harapan terhadap keluarga penerima manfaat di Desa Kayuuwi, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan sejak 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018, bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk keluarga miskin dengan 10 tahapan pelaksanaan mulai perencanaan hingga transformasi kepesertaan. Di Desa Kayuuwi (penduduk 897 jiwa, 299 Kartu Keluarga), jumlah penerima stabil 36 Kartu Keluarga sejak 2023 setelah graduasi dari 41 Kartu Keluarga, namun menghadapi kendala ketidaktepatan sasaran akibat data Data Terpadu Keluarga Sosial tidak update, validasi kurang cermat, dan koordinasi lemah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis empat faktor implementasi menurut teori George C. Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara purposive (kepala desa, sekretaris, pendamping Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat, masyarakat), observasi, dan dokumentasi, diuji dengan triangulasi dan member check, dianalisis Miles & Huberman (reduksi, penyajian, verifikasi). Hasil menunjukkan implementasi Program Keluarga Harapan berjalan baik secara umum: komunikasi via rapat, WhatsApp, kunjungan; sumber daya pendamping/aparat memadai meski penyaluran kadang terlambat; disposisi pelaksana positif dengan himbuan patuh dan rajin kerja bakti, Keluarga Penerima Manfaat patuh tapi masyarakat non-penerima kecewa; struktur birokrasi terkoordinasi via musdes tapi pembaruan data lambat. Meski berdampak positif pada ekonomi Keluarga Penerima Manfaat, ketidaktepatan sasaran (keluarga mampu masih terima, miskin terlewat) menunjukkan implementasi belum optimal. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan peningkatan verifikasi data Data Terpadu Keluarga Sosial desa, sosialisasi intensif, koordinasi antarlembaga, sanksi administratif, dan pendampingan rutin untuk tepat sasaran serta graduasi efektif

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Keberhasilan Program Keluarga Harapan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat tetapi juga pada bagaimana tahapan pelaksanaan, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat berlangsung di tingkat desa. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kayuwi memiliki peran strategis dalam mewujudkan perubahan positif bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa. Program ini menargetkan kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, dengan tujuan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya (Kementrian Sosial RI 2019).

Namun, dalam pelaksanaannya, Masih terdapat permasalahan dalam implementasi Program Keluarga Harapan di lapangan yang tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu masalah yang terjadi ialah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, di mana masih terdapat keluarga kurang mampu yang seharusnya layak menerima bantuan tapi tidak tercatat atau justru terlewat dari daftar penerima, Seperti yang ada di Desa Kayuwi keluarga yang seharusnya dapat untuk menerima bantuan yaitu lansia atau lanjut usia yang sudah janda atau duda yang hanya tinggal sendiri dan sudah tidak dapat mampu bekerja dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak baik dan juga kepada keluarga yang tidak berpenghasilan serta memiliki kondisi ekonomi yang tidak baik atau bisa dikatakan miskin mereka ini sangat rentan terhdap ekonomi dan sangat

membutuhkan dukungan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang ada di keluarga mereka. Hal ini memperkuat untuk memberikan bantuan untuk ditujukan kepada mereka yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Sementara keluarga yang sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat dan ekonominya sudah meningkat tetapi tetap menerima bantuan. Seperti yang ada di Desa Kayuwi adanya keluarga yang menerima bantuan ekonominya sudah stabil atau bisa dikatakan sudah baik dimana keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bergantung lagi kepada bantuan yang ada karena berpenghasilan yang cukup dan dikatakan masih bisa dapat bekerja karena kesehatan dan tenaga mereka yang yang masih sehat, dan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka tanpa menggunakan bantuan yang sebenarnya ditunjukkan untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Faktor penyebab ketidaktepatan sasaran yang terlihat yaitu ketidakesesuaian data penerima dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data ganda, dan data yang belum diperbarui yang menimbulkan ketidaktepatan sasaran bantuan, proses validasi di lapangan yang kurang cermat dan cekatan dalam melihat masyarakat yang menerima bantuan, dan pasti adanya perubahan kondisi perekonomian masyarakat desa yang berlangsung membaik dan sudah dapat dikatakan ekonominya sudah stabil. Selain itu, keterbatasan komunikasi antar pelaksana program

yang ada Desa Kayuwi, kurangnya juga partisipasi dari masyarakat dalam tahapan sosialisasi maupun pendampingan Program Keluarga Harapan, serta koordinasi administratif yang belum optimal, turut memperbesar peluang terjadinya salah sasaran yang seharusnya tidak terjadi. Masalah ini dapat mengakibatkan bantuan sosial tidak terdistribusi secara adil dan efektif dalam masyarakat yang ada di Desa Kayuwi, sehingga tujuan utama Program Keluarga Harapan untuk dapat membantu keluarga miskin menjadi kurang tercapai dan terlaksana dengan baik sesuai kebijakan Pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018.

Dengan latar belakang sosial ekonomi masyarakat Desa Kayuwi yang sangat beragam, pelaksanaan program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan membutuhkan pengelolaan yang cermat agar perubahan yang diharapkan benar-benar dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan. Upaya evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan sangat diperlukan, mulai dari peningkatan akurasi data penerima manfaat, penguatan koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan program, sampai optimalisasi peran pendamping Program Keluarga Harapan dalam memberikan edukasi dan monitoring di lapangan karena sangat penting mengetahui perkembangan ekonomi dalam keluarga penerima manfaat.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan bisa menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas program tersebut. Penelitian ini diperlukan agar

implementasi PKH di Desa Kayuwi dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas hidup penerima manfaat. Evaluasi ini bukan hanya untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada yang berhak menerima bantuan, tetapi juga untuk mewujudkan harapan pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi dan menciptakan keluarga-keluarga yang mandiri serta berdaya saing. Selain itu, hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat mampu memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa dan lembaga terkait dalam memperbaiki pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat desa.

Oleh karena itu, melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat dalam analisis mendalam terhadap implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kayuwi menjadi sangat penting sebagai landasan dalam perumusan kebijakan ke depannya. Harapannya, hasil dari kajian ini dapat membantu pemerintah Desa Kayuwi dan seluruh pihak terkait menciptakan strategi pelaksanaan program Program Keluarga Harapan yang lebih baik, efektif, dan tepat sasaran, sehingga manfaat yang diberikan dapat benar-benar dapat membantu keluarga penerima manfaat dan masyarakat di Desa Kayuwi secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di

Desa Desa Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat.

Fokus Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kayuwi dengan fokus pada keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai subjek utama. Dengan menganalisis empat faktor penting menurut teori George Edwards III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Menurut Miles dan Huberman dalam (1994), ada beberapa tahapan dalam pengolahan data kualitatif, diantaranya yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

Pembahasan

Mengenai Pembahasan dalam Implementasi PKH di Desa Kayuwi telah mengikuti tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta, validasi data, penetapan penerima, penyaluran bantuan, pendampingan, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen, pemutakhiran data, hingga transformasi kepesertaan. Sudah berjalan cukup baik Proses ini dilaksanakan secara terstruktur dengan melibatkan pemerintah desa, pendamping PKH

Berdasarkan hasil wawancara menggunakan teori implementasi dari George III yang melihat empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, namun

masih ada kekuarangan dalam proses implementasi program keluarga harapan yang ada di desa kayuwi dimana dibutuhkan koodinasi dalam pelaksanaan program agar program ini dapat berjalan lancar sesuai tujuan pemerintah. Proses ini dilaksanakan secara terstruktur dengan melibatkan pemerintah desa, dimana pembahasan ini menggunakan teori implementasi George Edward III yang melihat bagaimana implementasi program keluarga harapan.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah faktor fundamental yang menentukan seberapa efektif informasi kebijakan PKH tersampaikan dengan baik dari pemerintah ke keluarga penerima manfaat. Dalam konteks Desa Kayuwi, komunikasi dilakukan melalui berbagai saluran seperti sosialisasi langsung via loudspeaker, musyawarah desa, dan kunjungan rumah oleh aparat desa dan pendamping PKH. Berdasarkan hasil wawancara, Hukum Tua Desa, Bapak Stenli DJ. Watung, menyampaikan bahwa informasi biasanya disebarkan lewat loudspeaker dan forum musyawarah desa sehingga masyarakat dapat menerima pemberitahuan terkait tahapan program keluarga harapan secara informal dan formal. Namun, walaupun komunikasi berlangsung secara intensif, informan juga mengungkapkan beberapa kendala.

Kendala utama adalah inkonsistensi pelaksanaan rapat yang seharusnya rutin dilakukan setiap bulan, tetapi dalam praktiknya sering tertunda hingga empat bulan sekali. Hal ini menyebabkan sebagian penerima sulit mendapatkan informasi terbaru secara langsung. Pendamping PKH, Bapak A.L, menambahkan bahwa mekanisme koordinasi dan

pengawasan selama pendampingan sudah dijalankan secara ketat dengan melakukan rapat berkala dan tindak lanjut penggunaan bantuan. Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua penerima memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan PKH karena kompleksitas informasi dan pendekatan komunikasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi masyarakat.

Keluarga penerima manfaat juga mengakui bahwa mereka mendapatkan informasi PKH awalnya dari pemerintah desa, termasuk proses pendataan dan sosialisasi formal, namun pemahaman tentang komponen bantuan dan konsekuensi penggunaannya masih perlu ditingkatkan agar manfaat program dapat maksimal. Masyarakat juga menyampaikan bahwa sosialisasi belum merata, sehingga ada keluarga yang kurang paham tentang prosedur dan kewajiban penerima bantuan.

Dari perspektif teori implementasi George Edward III, komunikasi yang efektif mensyaratkan informasi yang jelas, saluran komunikasi yang dapat diakses, dan feedback antara pelaksana dan penerima. Dalam kasus Desa Kayuwi, komunikasi berjalan aktif namun perlu perbaikan dalam frekuensi dan metode agar seluruh penerima manfaat dapat menerima informasi lengkap dan tepat waktu.

2. Sumber Daya

Tenaga pendamping dan pemerintah desa dinilai memadai, namun terdapat keterlambatan penyaluran bantuan dan ketidaktepatan sasaran yang masih ada dalam program keluarga harapan. Data penerima berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, juga ditambah juga dari sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah desa

tetapi pembaruan data sering terlambat, sehingga berdampak pada ketepatan sasaran yang ada dalam program keluarga harapan. Secara umum, dukungan sumber daya memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi keluarga penerima manfaat.

Sumber daya menjadi faktor kunci berikutnya yang meliputi ketersediaan tenaga pendamping Program Keluarga Harapan yang kompeten, data penerima manfaat yang akurat dan valid, serta fasilitas administrasi pendukung kebijakan. Wawancara dengan Hukum Tua dan Sekretaris Desa mengindikasikan bahwa tenaga pendamping dan aparat desa secara umum sudah memadai dan proaktif melakukan kunjungan ke rumah-rumah penerima untuk memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Pendamping PKH menjelaskan proses verifikasi berjalan dengan mengumpulkan data tentang kondisi ekonomi keluarga, pekerjaan, dan penghasilan bulanan yang kemudian dikirimkan ke Dinas Sosial untuk divalidasi lebih lanjut. Namun, pendataan sering terkendala oleh pembaruan data yang lambat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan akibatnya ada penerima yang seharusnya sudah tidak layak tapi tetap tercatat serta sebaliknya.

Pengalaman keluarga penerima menunjukkan bahwa bantuan yang diterima cukup membantu terutama untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan pokok keluarga. Meski demikian, ada keluhan mengenai ketidakteraturan penyaluran dana, dimana pencairan kadang terlambat, sehingga mengganggu pemanfaatan bantuan secara optimal. Beberapa keluarga juga mengaku pernah mengalami penghentian bantuan

sementara karena kendala administrasi seperti masalah kartu KKS.

Dari sisi dukungan sumber daya, meskipun tenaga pendamping dan infrastruktur administrasi sudah berjalan, koordinasi antar lembaga serta pembaruan data harus diperkuat supaya bantuan tepat waktu dan tepat sasaran, selaras dengan prinsip efektivitas yang diagung-agungkan dalam teori implementasi.

3. Disposisi

Sikap dan komitmen pemerintah desa serta pendamping PKH terhadap pelaksanaan PKH tergolong baik. Mereka aktif mengingatkan penerima untuk memenuhi kewajiban dan memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan. Namun, ada sebagian yang tidak menerima bantuan program keluarga harapan merasa bantuan terlalu banyak dan ingin mendapatkannya, menunjukkan perlunya sosialisasi lebih intensif tentang prinsip keadilan dan selektivitas program karena program keluarga harapan ini berdampak besar dalam kehidupan penerima bantuan yang dimana juga terlihat kepada keluarga yang tidak menerima bantuan.

Disposisi atau sikap pelaksana program menjadi faktor ketiga yang tak kalah penting. Sikap yang positif dari aparat desa dan pendamping PKH sangat terlihat dalam pelaksanaan program di Desa Kayuwi. Mereka menunjukkan komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas dengan rutin mengingatkan keluarga penerima tentang kewajiban dan larangan penggunaan bantuan.

Pendamping selalu mengadakan rapat rutin dengan penerima dan memastikan adanya daftar hadir sebagai bentuk

pengawasan komitmen. Hukum Tua dan Sekretaris Desa juga melaporkan adanya pendekatan persuasif untuk mengajak penerima manfaat lebih rajin dalam kegiatan desa seperti kerja bakti maupun musyawarah, guna mendukung kewajiban sosial dan transparansi penggunaan bantuan.

Dari sisi penerima manfaat, mayoritas memiliki komitmen baik dengan memanfaatkan bantuan sesuai komponen program seperti pendidikan dan kebutuhan pokok keluarga. Namun demikian, terdapat juga keluhan dari masyarakat lain yang tidak menerima bantuan, merasa kurang puas dan mempertanyakan keadilan distribusi bantuan. Hal ini menandakan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih terbuka dan sosialisasi tentang kriteria penerima serta prinsip selektivitas agar tidak terjadi ketimpangan persepsi di masyarakat.

Menurut teori implementasi George Edward III, disposisi yang baik dari pelaksana dapat memperlancar implementasi program dengan sikap yang konsisten dan responsif terhadap masalah. Meski demikian, aspek sosialisasi keadilan distribusi perlu diperkuat guna mengatasi rasa ketidakpuasan masyarakat yang tidak tercover program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di tingkat desa mengatur kelancaran prosedur teknis dalam pelaksanaan PKH. Wawancara kepada aparat desa dan pendamping PKH menunjukkan bahwa mekanisme organisasi, pelaporan, dan evaluasi melalui musyawarah desa dan koordinasi dengan dinas sosial. Proses administrasi PKH melibatkan penggunaan KKS, diaman pengambilan bantuan di kantor pos atau BRILink, serta informasi melalui grup WhatsApp dan pendamping. Kendala

utama adalah absensi penerima dalam sosialisasi, data yang belum cepat diperbarui dalam keadaan ekonomi keluarga penerima program keluarga harapan, serta perlunya koordinasi lebih baik antar pihak pemerintah desa serta pendamping serta pemerintah yang menjalankan program keluarga harapan agar penyaluran bantuan lebih akurat dan efektif agar keluarga yang sebenarnya berhak menerima malah tidak menerima dan keluarga yang seharusnya sudah dapat diganti dimana terlihat dari hasil penelitian, keluarga penerima yang masih menyangkan bantuan yang mereka terima yang sebenarnya mereka ekonomi sudah bisa di bilang stabil dan tercukupi untuk di ganti dengan yang membutuhkan.

Administrasi pendataan dan penyaluran bantuan menggunakan kartu KKS dan turut melibatkan layanan pengambilan di kantor pos atau BRILink, sementara komunikasi informasi dilakukan melalui grup WhatsApp dan peran aktif pendamping. Namun, tantangan muncul dari data yang kadangkala terlambat diperbarui yang selalu di bahas dalam pembahasan, penerima yang absen dalam sosialisasi, serta koordinasi antar stakeholder masih perlu diperbaiki untuk memastikan validitas dan ketepatan sasaran bantuan yang ada.

Struktur yang terorganisir dengan baik menjadi krusial agar penyaluran bantuan tepat waktu dan transparan, serta meminimalisir tumpang tindih dan penerima yang tidak tepat sasaran. Penyesuaian pada prosedur administratif dan penguatan koordinasi dinas sosial dengan pendamping serta juga aparat desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi PKH di Desa Kayuwi sudah memfasilitasi pelaksanaan program secara formal sesuai prosedur, tetapi perlu peningkatan dinamis agar responsif terhadap perubahan data dan kebutuhan masyarakat. Pembahasan ini juga melihat komponen dan indeks bantuan sosial program keluarga harapan yang diberikan dalam per 3 bulan sekali yang memiliki 4 tahap dalam setahun.

Penutup

Kesimpulan

Komunikasi antar pihak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kayuwi berjalan intensif melalui sosialisasi, rapat bulanan, dan pendataan langsung. Namun, konsistensi waktu pelaksanaan rapat masih belum menetap setiap tahun, serta akses informasi terhadap program PKH masih terbatas bagi sebagian penerima. Sosialisasi dilakukan melalui loudspeaker, musyawarah desa, dan kunjungan rumah, tetapi pemahaman penerima terhadap syarat dan ketentuan Program Keluarga Harapan masih belum mendalam

Ketersediaan tenaga pendamping dan pemerintah desa dinilai cukup memadai, namun masih mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana dan ketidaktepatan sasaran akibat data yang belum selalu terbaru dan valid. Dukungan sumber daya ini secara umum berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga, Namun, pendataan sering terkendala oleh pembaruan data yang lambat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan akibatnya ada penerima yang seharusnya sudah tidak layak tapi tetap tercatat serta sebaliknya. Proses administrasi dan pembaruan data perlu ditingkatkan

agar hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran dalam menjalankan program keluarga harapan.

Sikap dan komitmen pemerintah desa serta pendamping PKH terhadap pelaksanaan PKH tergolong baik. Mereka aktif mengingatkan penerima untuk memenuhi kewajiban dan memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan. Sikap, motivasi, dan komitmen pemerintah desa dan pendamping PKH tergolong baik, dengan upaya aktif mengingatkan dan mendampingi keluarga penerima. Meski demikian, muncul persepsi masyarakat yang tidak menerima bantuan yang juga ingin merasakan manfaat dari program keluarga harapan, yang menunjukkan perlunya sosialisasi lebih efektif tentang prinsip keadilan dan selektivitas program untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan program keluarga harapan.

Struktur birokrasi di Desa Kayuwi cukup terorganisir, dengan mekanisme pelaporan dan evaluasi melalui musyawarah desa dan koordinasi dengan dinas sosial. Proses administrasi PKH melibatkan penggunaan KKS, serta informasi melalui grup WhatsApp dan pendamping, namun masih adanya kendala utama adalah masih adanya data yang terlambat diperbarui, absensi dalam sosialisasi, dan koordinasi antar lembaga yang perlu ditingkatkan agar proses penyaluran lebih akurat, transparan, dan efisien dalam program keluarga harapan yang ada di desa kayuwi agar tidak terjadinya ketidaktepatan sasaran yang ada dalam program keluarga harapan..

Saran

Pemerintah desa dapat menjaga transparansi dengan menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat serta melibatkan warga dalam musyawarah agar keputusan lebih adil dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau politik. Hukum tua juga dapat ikut serta dalam pendataan dan adanya juga rekomendasi dari hukum tua karna yang lebih tahu ekonomi masyarakat desa kayuwi adalah hukum tua maka dari itu hukum tua dapat ikut serta dalam pemilihan dan rekomendasi program keluarga harapan untuk desa kayuwi.

Indikator sumber daya terlihat dari pengelolaan bantuan, kapasitas pendamping, serta dukungan pemerintah. Pendamping PKH menjadi sumber daya utama di lapangan yang mengatur timeline dalam tahapan PKH di desa, yang dimana harus adanya timeline atau perkiraan waktu yang tetap yang dapat ditetapkan dalam tahapan PKH di desa sekaligus juga pada gambaran estimasi waktu konkret dalam pelaksanaan di tingkat desa yang sebaiknya di tetapkan agar program berjalan sesuai waktu yang di tentukan dan tidak terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan yang nantinya dapat di cantumkan secara spesifik dalam Peraturan Menteri Sosial.

Disposisi berkaitan dengan sikap, integritas, dan komitmen para pelaksana serta penerima program. Pemerintah desa menunjukkan komitmen melalui verifikasi rutin bersama pendamping agar data penerima benar-benar akurat, menjaga keadilan dalam penentuan penerima agar masyarakat memahami proses seleksi, dan aktif juga mengawasi penyaluran bantuan serta

segera melaporkan indikasi penyimpangan.

Struktur birokrasi tercermin dari alur kewenangan dan prosedur dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa. Pemerintah desa dan pendamping PKH selalu memverifikasi data untuk menjaga transparansi dalam program keluarga harapan, dan mengawasi penyaluran bantuan. Pendamping juga perlu aktif melakukan kunjungan dan pembinaan kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan utama sesuai komponen yang di dapat oleh keluarga penerima manfaat.

Daftar Pustaka

- Azhari, M., & Zulfikar, I. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 247-262.
- Aziz, S. S. (2022). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Subang (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Herlina, H., Warjio, W., & Siregar, N. S. S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 153-161.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2025) Diakses 17 November 2025 <https://share.google/fqP3xzIqVeLw dJS4c>
- Kayuuwi, Kawangkoan Barat, Minahasa - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 2025 Diakses 20 Januari 2026 <https://share.google/3wVpjt68yfTgZ K0Pu>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications
- Mardiah, A. A., Nawawi, M., & Safithri, R. (2025). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 705-710.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Narbuko, C. & Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ninik Nikmatul, J. (2023). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Purwojati Banyumas) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Nugroho, S. (2006). *Implementasi program sosial di Indonesia: Studi kasus PKH*
- Prisca Lucya, P. L. (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Winarno, B. (2016). Kebijakan publik:
Teori dan praktik di Indonesia.